

Optimalisasi Tata Kelola Koperasi Masyarakat Nelayan Batu Rusa

(Optimizing the Governance of the Batu Rusa Fishermen's Cooperative)

Muhammad Qomaruddin Ridwan^{1*}, Rulyanti Susi Wardhani², Yokotani Yokotani³

Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia^{1,2,3}

mqomaruddin@ubb.ac.id¹, rulyantiwardhani67@gmail.com², yokotanimayo@gmail.com³



Riwayat Artikel

Diterima pada 10 Desember 2025

Revisi 1 pada 18 Desember 2025

Revisi 2 pada 25 Desember 2025

Revisi 3 pada 02 Januari 2026

Disetujui pada 08 Januari 2026

Abstract

Purpose: This community service activity aims to optimizing the governance of fishing community cooperatives in Batu Rusa Village, Bangka Regency.

Methodology/approach: Implementation of activities includes observation, socialization, mentoring, as well as monitoring and evaluation which is carried out in a participatory manner by involving cooperative administrators and members.

Results/findings: The results of the activities demonstrated an increase in the institutional capacity of cooperatives through the creation of legal documents in the form of notarial deeds, articles of association (AD/ART), governance guidelines, and a financial record-keeping manual. Furthermore, there was an increased understanding among cooperative administrators and members of the importance of transparency, accountability, and professionalism in managing joint ventures.

Conclusions: This activity contributes to strengthening the economy of coastal communities by optimizing the governance of fishing cooperation in Batu Rusa Village.

Limitations: This activity has limited time and budget, so not all issues within the Batu Rusa Village fishing community cooperative can be resolved. We hope to continue this activity in the future to ensure the sustainability of the Batu Rusa Village fishing community cooperative.

Contributions: Batu Rusa Village fishing community cooperative has good legal standing and governance, as well as transparent and accountable financial management guidelines. Furthermore, this activity has been proven to increase the awareness and skills of cooperative members regarding the importance of legality, governance, and sound financial record-keeping for the cooperative's sustainability.

Keywords: *Community Empowerment, Cooperatives, Financial Report, Food Security, Governance*

How to Cite: Ridwan, M, Q., Wardhani, R, S., Yokotani, Y. (2026). Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Tata Kelola Koperasi Masyarakat Nelayan Batu Rusa. *Kenali Risikonya Lindungi Diri dengan Aman. Jurnal Pemberdayaan Umat*, 5(1), 31-43.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang luas memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, berkontribusi pada penyediaan pangan, lapangan kerja, devisa negara, serta kesejahteraan masyarakat pesisir ([Anggraeni, Rustiadi, & Yulianto, 2020](#); [Kusdiantoro, Fahrudin, Wisudo, & Juanda, 2019](#)). Kepulauan Bangka Belitung, sebagai salah satu provinsi kepulauan di

Indonesia, memiliki karakteristik geografik yang didominasi oleh wilayah laut. Hal ini menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu fokus utama pengembangan ekonomi daerah ([Kurniawan, br Sebayang, & Utami, 2019](#); [Kusdiantoro et al., 2019](#); [Mayu, Wijayanto, Mudzakir, & Kurniawan, 2021](#); [Nurphadilah, Jubaedah, Yulistianto, & Samsuri, 2022](#)). Masyarakat Bangka Belitung, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir secara tradisional menggantungkan hidupnya pada aktivitas perikanan baik sebagai nelayan tangkap, pembudidaya ikan, maupun pedagang hasil perikanan ([Mardiyani & Yulianti, 2020](#); [Nurphadilah et al., 2022](#); [Yuliani, 2020](#)). Potensi besar sektor perikanan di Bangka Belitung belum sepenuhnya terealisasi secara optimal, sehingga membutuhkan peran berbagai pihak termasuk perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan masalah dalam memanfaatkan dan mengelola potensi perikanan di Bangka Belitung ([Limbong, 2018](#)).

Berbagai permasalahan masih dihadapi oleh masyarakat perikanan, di antaranya akses pasar yang terbatas, fluktuasi harga ikan, keterbatasan modal, teknologi penangkapan yang masih tradisional, dan pengorganisasian usaha yang belum optimal ([Daryono, Salim, & Nurisnany, 2021](#)). Berbagai masalah tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan hadirnya koperasi masyarakat. Keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat ([Nasution, Hidayati, Nasution, & Hasyim, 2024](#); [Tikara, Taqwa, Sading, Jaya, & Musdayati, 2026](#)). Koperasi perikanan menjadi alternatif bagi para nelayan untuk bekerjasama dan meningkatkan kesejahteraan, dimana kopersi perikanan sebagai wadah untuk berorganisasi dan memperluas wawasan informasi bagi para nelayan ([Arifandy, Norsain, & Firmansyah, 2020](#)). Salah satu koperasi perikanan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri yang terletak di Desa Batu Rusa.

Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri merupakan koperasi masyarakat nelayan yang baru berdiri pada akhir tahun 2023. Sebagai lembaga yang masih berada pada tahap awal pembentukan, koperasi ini menghadapi tantangan serius terutama dalam aspek legalitas kelembagaan. Legalitas merupakan fondasi utama yang menjamin keberlangsungan dan kredibilitas koperasi di mata masyarakat, pemerintah, maupun mitra usaha. Tanpa status hukum yang jelas, koperasi akan kesulitan memperoleh pengakuan resmi, mengakses sumber pendanaan, serta melindungi hak-hak anggotanya. Legalitas juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan kelembagaan yang memastikan koperasi beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengurusnya ([Ernawati & Fauziyanti, 2022](#); [Mirza, Br, Putra, Desriani, & Rohman, 2024](#)).

Selain legalitas, koperasi juga memerlukan dokumen kelembagaan yang kuat berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). AD/ART tidak hanya menjadi pedoman formal bagi pengurus dalam mengatur struktur organisasi, keanggotaan, serta mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi instrumen tata kelola yang menjamin setiap kebijakan koperasi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif ([Saputra & Firmansyah, 2024](#)). Ketiadaan AD/ART sebagai dokumen yang menjelaskan budaya organisasi sering kali menyebabkan koperasi kehilangan arah manajerial, munculnya konflik kepentingan, dan lemahnya sistem pengawasan internal ([Baranti, Anwar, & Qamaruddin, 2024](#); [Dewi, 2019](#)). Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan AD/ART yang jelas merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi tata kelola koperasi yang sehat dan demokratis. AD/ART dalam sebuah organisasi juga berperan dalam memastikan distribusi manfaat yang dihasilkan berkeadilan sehingga semua pihak yang terlibat merasakan manfaat yang sepadan ([Damayanti, Sitio, & Wicaksono, 2025](#); [Nugraha, Hamid, & Qamaruddin, 2024](#)).

Namun demikian, keberadaan legalitas dan AD/ART saja belum cukup untuk memastikan koperasi dapat berfungsi secara efektif. Sebuah koperasi baru dapat dikatakan berjalan secara profesional apabila memiliki sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pengelolaan keuangan merupakan jantung dari operasional koperasi karena seluruh kegiatan ekonomi bergantung pada bagaimana dana anggota dikelola, dicatat, dan dipertanggungjawabkan ([Dasuki, 2024](#); [Pramithasari & Wibowo, 2025](#)). Pengelolaan keuangan yang baik mencakup pencatatan transaksi yang akurat, pengelolaan kas yang efisien, sistem pengendalian internal yang memadai, serta pelaporan keuangan yang transparan dan

periodic ([Ridwan, Yunita, & Harahap, 2024](#)). Tanpa sistem keuangan yang tertata, koperasi berisiko mengalami penyalahgunaan sumberdaya, kehilangan kepercayaan anggota, dan kesulitan dalam mengukur kinerja usahanya ([Lu'luatuwwafiroh, Utami, Jailani, & Ariyanto, 2025](#); [Widiana et al., 2026](#); [Wiliastiti, Goca, & Putri, 2025](#)). Berdasarkan urgensi yang telah dijabarkan, maka kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung bertujuan memberikan pendampingan kepada Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri dalam pengurusan legalitas, penyusunan AD/ART, penerapan tata kelola yang berkelanjutan dan implementasi manajemen keuangan yang baik. Diharapkan pendampingan ini dapat memberdayakan Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri untuk beroperasi secara legal, profesional dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya dan masyarakat nelayan di Desa Batu Rusa.

2. Metodologi Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pengamatan (observasi), sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi (monev). Tahap pengamatan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri, termasuk struktur organisasi, aktivitas usaha, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi. Melalui proses ini, tim pengabdian mampu mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang menghambat perkembangan koperasi. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi difokuskan pada peningkatan pemahaman anggota koperasi terhadap pentingnya aspek legalitas dan tata kelola keuangan yang baik. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan urgensi pengelolaan koperasi yang transparan dan akuntabel sebagai dasar keberlanjutan usaha ([Timang, Baktiar, & Yunus, 2026](#)).

Tahap pendampingan dilakukan secara intensif dengan memberikan arahan, pelatihan, serta konsultasi kepada pengurus dan anggota, khususnya para nelayan, agar mampu mengimplementasikan praktik manajerial yang lebih efektif. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia koperasi. Terakhir, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan guna menilai efektivitas pelaksanaan program serta mengukur tingkat keberhasilan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan strategi dan pengembangan program lanjutan di masa mendatang. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan tiga permasalahan utama yang memerlukan penyelesaian segera, yaitu terkait legalitas, tata kelola organisasi, dan pengelolaan keuangan koperasi, yang selanjutnya menjadi fokus intervensi tim pengabdian Universitas Bangka Belitung.

2.1 Permasalahan Legalitas

Legalitas merupakan aspek fundamental bagi keberlangsungan sebuah organisasi, termasuk koperasi. Keberadaan legalitas memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjalankan kegiatan usaha dan memastikan setiap aktivitas koperasi berada dalam koridor peraturan yang berlaku ([Ernawati & Fauziyanti, 2022](#)). Bagi koperasi, legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan hukum, tetapi juga memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan, peningkatan kepercayaan dari mitra kerja maupun anggota, serta memperoleh pengakuan dan dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif, pelatihan, dan fasilitas lainnya ([Sugiartiningsih et al., 2025](#)).

Dengan demikian, legalitas menjadi fondasi penting bagi koperasi untuk tumbuh secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Menanggapi pentingnya hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai urgensi legalitas bagi Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran anggota koperasi terhadap pentingnya status hukum yang sah dalam menunjang keberlanjutan usaha. Setelah tahap sosialisasi, tim melanjutkan dengan pendampingan langsung dalam proses pengurusan legalitas koperasi melalui notaris.

Dalam proses ini, tim pengabdian juga menanggung biaya pengurusan akta notaris sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penguatan kelembagaan koperasi. Pengurus koperasi diberikan keleluasaan untuk menentukan bidang usaha yang akan dicantumkan dalam akta pendirian, agar dapat

menyesuaikan dengan potensi ekonomi setempat serta memperluas peluang pengembangan usaha. Diharapkan, langkah ini dapat memperkuat posisi Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri, kredibel, dan berdaya saing.

2.2 Permasalahan Tatakelola

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) merupakan instrumen fundamental dalam tata kelola koperasi karena berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur jalannya organisasi ([Dewi, 2019](#)). Dokumen ini memuat ketentuan mengenai struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban setiap anggota koperasi. Selain itu, AD-ART juga berperan penting dalam menetapkan visi, misi, dan arah pengembangan koperasi agar seluruh kegiatan yang dilakukan memiliki landasan hukum dan tujuan yang jelas ([Ciptagustia, Sari, & Gaffar, 2022](#)). Dengan adanya AD-ART, koperasi dapat menjalankan fungsinya secara transparan, demokratis, dan akuntabel, sekaligus memiliki mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa internal di kemudian hari.

Dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan, tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Bangka Belitung akan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya penyusunan dan penerapan AD-ART bagi Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota terhadap peran strategis AD-ART sebagai landasan operasional dan pengambilan keputusan koperasi. Setelah sosialisasi, tim akan melakukan pendampingan intensif kepada pengurus koperasi dalam proses penyusunan dokumen AD-ART yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha koperasi. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian juga menanggung seluruh biaya pengadaan dokumen tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kelembagaan koperasi. Pengurus dan anggota koperasi diberikan kebebasan untuk menentukan isi AD-ART dengan tetap mendapatkan bimbingan dan arahan agar substansi yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Permasalahan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan sebuah organisasi, termasuk bagi Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri. Sistem keuangan yang tertata dengan baik memungkinkan koperasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik dalam bentuk modal, aset, maupun hasil usaha ([Ridwan et al., 2024](#); [Ridwan & Zaky, 2015](#)). Dengan demikian, koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas kegiatan usaha, serta memperkuat posisi keuangan jangka panjangnya ([Muharram, 2023](#); [Rahayu, Yudi, Jumaili, Rahayu, & Ridwan, 2021](#)). Selain itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, yang biasanya disampaikan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Melalui tata kelola keuangan yang baik, kepercayaan anggota terhadap koperasi dapat terjaga, sehingga partisipasi dan loyalitas anggota pun meningkat. Dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kegiatan ini disertai dengan penyusunan panduan pengelolaan keuangan sederhana yang disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kemampuan administratif pengurus koperasi. Panduan ini mencakup aspek pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas, serta mekanisme audit internal koperasi. Tim pengabdian juga menggunakan pendekatan partisipatif melalui survei dan kuesioner untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kebutuhan anggota terkait manajemen keuangan. Hasil survei ini menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan modul keuangan koperasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengurus dan anggota Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri mampu menerapkan praktik keuangan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara kolektif.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Bangka Belitung bekerja sama dengan Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri di Desa Batu

Rusa, Kabupaten Bangka. Program ini berlangsung dari bulan Februari hingga Oktober 2025 dengan fokus utama memperkuat kelembagaan koperasi masyarakat nelayan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan berbasis ekonomi lokal. Kegiatan diawali dengan tahap koordinasi bersama pengurus koperasi dan aparat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas mitra.

Pendekatan partisipatif ini bertujuan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa koperasi masih beroperasi secara informal tanpa memiliki dokumen hukum yang sah, belum dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta belum menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas dan akuntabilitas kegiatan koperasi, sehingga menyulitkan koperasi untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan dipercaya oleh anggotanya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memperkuat aspek legalitas, tata kelola organisasi, dan kapasitas administrasi keuangan koperasi agar dapat berfungsi secara profesional dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir.



Gambar 1. Diskusi dan observasi bersama ketua kelompok nelayan

3.1 Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas

Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas koperasi menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen Universitas Bangka Belitung. Materi ini disampaikan oleh Yokotani, S.H., M.H., anggota tim yang memiliki keahlian di bidang hukum, dengan tujuan meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri mengenai urgensi aspek hukum dalam tata kelola kelembagaan. Dalam pemaparannya, Yokotani menekankan bahwa legalitas merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan kredibilitas organisasi koperasi. Sebagai entitas ekonomi berbasis keanggotaan, koperasi membutuhkan pengakuan hukum agar dapat beroperasi secara sah, memperoleh kepercayaan publik, dan memiliki perlindungan terhadap hak serta kewajiban anggotanya.



Gambar 2. Penyerahan sertifikat kepada narasumber

Yokotani menekankan bahwa legalitas bukan sekadar persoalan administratif, melainkan instrumen perlindungan kelembagaan yang memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan legitimasi sosial di mata pemerintah serta lembaga keuangan. Tanpa dasar hukum yang kuat, koperasi akan sulit mengakses program pembinaan, permodalan, maupun kerja sama dengan pihak eksternal. Pemahaman baru ini mengubah perspektif pengurus koperasi yang sebelumnya menganggap legalitas sebagai hal sekunder, menjadi sesuatu yang bersifat mendasar dan strategis bagi keberlanjutan usaha. Para anggota pun mulai menyadari bahwa status hukum yang jelas akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap koperasi.

Setelah kegiatan sosialisasi, tim pengabdian melanjutkan program dengan pendampingan langsung dalam proses legalisasi kelembagaan. Proses ini melibatkan kerja sama antara tim pengabdian, notaris mitra, dan pengurus koperasi untuk menyusun akta pendirian, menetapkan bidang usaha, serta menyesuaikan struktur organisasi dengan regulasi yang berlaku. Pendampingan dilakukan secara partisipatif, di mana setiap keputusan penting terkait nama, keanggotaan, dan ruang lingkup usaha koperasi dibahas bersama melalui forum musyawarah. Melalui pendekatan ini, para pengurus tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam memahami setiap tahapan proses legalisasi.

Hasil dari kegiatan ini Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri akhirnya berhasil memperoleh akta notaris resmi, yang menjadi landasan hukum bagi pengakuan kelembagaan secara administratif dan yuridis. Dokumen ini tidak hanya memperkuat posisi koperasi dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengurus. Keberhasilan tersebut menjadi contoh inspiratif bagi koperasi nelayan lain di wilayah Bangka Belitung tentang pentingnya legalitas sebagai langkah awal menuju tata kelola koperasi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Selain aspek hukum, pentingnya legalitas juga berkaitan erat dengan tata kelola dan akuntabilitas organisasi. Koperasi yang telah terdaftar secara resmi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip *good cooperative governance* seperti transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Legalitas mendorong koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), menyusun laporan keuangan secara periodik, serta mempertanggungjawabkan penggunaan modal kepada seluruh anggota. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terdapat peningkatan kesadaran pengurus terhadap keteraturan administratif dan pencatatan keuangan setelah memperoleh pengakuan hukum. Mereka mulai menerapkan sistem pencatatan kas dan transaksi sederhana sesuai panduan yang diberikan tim pengabdian, sementara anggota koperasi menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dalam menanyakan laporan keuangan dan perkembangan usaha.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas ini tidak hanya menghasilkan pengakuan hukum formal, tetapi juga memicu transformasi kelembagaan koperasi menuju entitas ekonomi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Legalitas terbukti menjadi pintu masuk bagi penguatan tata kelola, peningkatan kepercayaan publik, dan perluasan peluang usaha, sehingga koperasi dapat berperan lebih efektif sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di Bangka Belitung.

3.2 Sosialisasi dan Pendampingan Tatakelola Koperasi

Tahapan berikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah sosialisasi dan pendampingan tata kelola koperasi, yang disampaikan oleh Dr. Rulyanti Susi Wardhani, S.E., M.Si., seorang ahli di bidang tata kelola organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kelembagaan Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri agar mampu beroperasi secara efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dalam sesi sosialisasi, Dr. Rulyanti menekankan bahwa tata kelola koperasi bukan sekadar seperangkat aturan administratif, melainkan suatu sistem nilai, prinsip, dan mekanisme yang mengatur hubungan antara pengurus, anggota, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama tata kelola adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial koperasi, sehingga setiap keputusan organisasi berorientasi pada keberlanjutan usaha sekaligus kesejahteraan anggota.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa tanpa sistem tata kelola yang baik, koperasi akan rentan terhadap konflik internal, penyalahgunaan wewenang, dan penurunan kepercayaan anggota. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dipahami sebagai pilar moral dan manajerial yang menentukan arah dan keberlanjutan organisasi. Dalam konteks Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri, sosialisasi ini memiliki arti penting karena koperasi tergolong baru berdiri dan belum memiliki struktur organisasi yang mapan. Melalui kegiatan ini, pengurus memperoleh pemahaman mendalam tentang fungsi rapat anggota sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan, pentingnya pembagian tugas yang jelas antara pengurus dan pengawas, serta mekanisme akuntabilitas internal yang menjamin keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan organisasi.

Setelah tahap sosialisasi, tim pengabdian melanjutkan kegiatan dengan pendampingan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Panduan Tata Kelola Koperasi. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pengurus, anggota, dan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif ini penting agar isi AD/ART tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perkoperasian, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal masyarakat pesisir. Dalam proses ini, Dr. Rulyanti memberikan bimbingan teknis mengenai desain struktur organisasi yang ideal, mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, serta sistem pengawasan internal yang efektif dan dapat diterapkan dalam skala koperasi nelayan. Diskusi interaktif digunakan sebagai metode utama, di mana anggota diajak untuk memahami hak, kewajiban, dan peran mereka dalam menentukan arah kebijakan koperasi.



Gambar 3. Sosialisasi tata kelola koperasi

Hasil dari pendampingan ini sangat nyata. Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri berhasil menyusun dokumen AD/ART yang komprehensif serta Panduan Tata Kelola Koperasi yang memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pengelolaan organisasi. Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman penting bagi pengurus dalam menjalankan aktivitas koperasi secara sistematis sekaligus mencegah potensi konflik internal di masa mendatang. Keterlibatan aktif anggota selama proses penyusunan juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan koperasi. Implementasi prinsip tata kelola yang baik menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku organisasi.

Berdasarkan hasil monitoring, pengurus mulai menerapkan sistem pencatatan kegiatan dan keuangan secara lebih teratur, menyusun agenda rapat berkala, serta melibatkan anggota dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan usaha. Keputusan-keputusan strategis, seperti penentuan harga beli hasil tangkapan dan pembagian laba, kini dilakukan melalui mekanisme musyawarah terbuka. Kondisi ini mencerminkan munculnya praktik demokrasi ekonomi di tingkat akar rumput, yang menjadi ciri utama koperasi sejati. Penerapan tata kelola yang baik juga berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat, ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah anggota baru dan meningkatnya partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi bersama.

Tata kelola yang transparan dan partisipatif merupakan faktor determinan dalam membangun kepercayaan serta memperluas manfaat koperasi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dipandu oleh Dr. Rulyanti Susi Wardhani tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi juga berhasil menumbuhkan budaya organisasi yang sehat, profesional, dan akuntabel. Transformasi kelembagaan ini memperkuat kapasitas koperasi dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara efisien, sekaligus menjadikannya sebagai instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan yang berkelanjutan di Desa Batu Rusa.

3.3 Pencatatan Keuangan

Aspek penting lain dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Batu Rusa adalah peningkatan kapasitas pengelolaan dan pencatatan keuangan koperasi, yang disampaikan oleh Alfiany Alim Imro'ah, M.Sc., dosen dengan kepakaran di bidang akuntansi dan keuangan publik. Materi ini menekankan bahwa manajemen keuangan merupakan jantung organisasi koperasi karena seluruh aktivitas ekonomi bergantung pada kemampuan koperasi dalam mengelola kas, mencatat transaksi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada anggotanya. Berdasarkan hasil observasi awal, Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang teratur.

Seluruh transaksi masih dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk menilai kinerja keuangan maupun menentukan besaran SHU (Sisa Hasil Usaha) secara adil. Dalam sesi pelatihan, Alfiany menjelaskan prinsip dasar akuntansi koperasi, termasuk pemisahan kas pribadi dan kas koperasi, pentingnya bukti transaksi, serta teknik sederhana pencatatan berbasis kas. Pendekatan pembelajaran dilakukan secara praktis dengan menggunakan contoh transaksi harian nelayan dan simulasi pencatatan buku kas koperasi. Pelatihan ini membuka wawasan baru bagi pengurus tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana anggota, yang merupakan inti dari kepercayaan dalam koperasi.



Gambar 3. Diskusi pengelolaan keuangan koperasi

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan, tim pengabdian menyusun Buku Panduan Pencatatan Keuangan Koperasi yang disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Buku panduan ini berisi format pencatatan sederhana yang mencakup buku kas harian, jurnal penerimaan dan pengeluaran, buku piutang, serta laporan posisi keuangan dan laporan hasil usaha yang dapat disusun secara periodik. Panduan ini juga memuat petunjuk tentang mekanisme pengawasan internal dan pelaporan ke rapat anggota tahunan. Dalam proses penyusunannya, Alfiany bersama tim melibatkan pengurus koperasi untuk memastikan bahwa setiap bagian panduan mudah dipahami dan aplikatif. Pendampingan implementasi panduan dilakukan melalui beberapa sesi praktek pencatatan transaksi aktual yang terjadi di koperasi, misalnya pembelian hasil tangkapan nelayan dan penjualan kembali kepada pedagang. Pengurus koperasi kemudian diajarkan untuk mengidentifikasi kesalahan pencatatan dan melakukan koreksi secara mandiri. Melalui proses ini, koperasi tidak hanya memiliki sistem administrasi keuangan yang tertata, tetapi juga memperoleh dokumen resmi berupa buku panduan pengelolaan keuangan koperasi produsen serumpun sejahtera mandiri yang menjadi rujukan permanen bagi keberlanjutan tata kelola keuangan di masa mendatang.

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pola pengelolaan keuangan koperasi. Pengurus mulai menerapkan prinsip *good financial governance* dengan melakukan pencatatan transaksi secara rutin dan menyiapkan laporan kas mingguan. Transparansi meningkat karena setiap laporan keuangan disampaikan dalam pertemuan anggota secara terbuka. Penerapan sistem pencatatan sederhana juga memungkinkan pengurus untuk menghitung Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan lebih akurat dan objektif. Dari perspektif kelembagaan, penerapan panduan keuangan ini menumbuhkan budaya disiplin dan tanggung jawab di kalangan pengurus. Sementara dari sisi sosial, anggota koperasi menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap kepengurusan, yang terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam dan pembelian saham koperasi.

Secara konseptual, keberhasilan ini memperkuat pandangan bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel merupakan faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan sistem keuangan yang tertib dan transparan, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas dan kepercayaan antaranggota. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian berhasil menanamkan dasar bagi koperasi yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan sebuah model yang relevan untuk direplikasi pada koperasi nelayan lain di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 4. Penyerahan buku panduan laporan keuangan koperasi kepada pengelola koperasi

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen Universitas Bangka Belitung di Desa Batu Rusa telah memberikan dampak signifikan dalam memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui optimalisasi tata kelola Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri. Program ini dirancang secara terintegrasi dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, edukatif, dan pendampingan berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan tiga capaian utama yang saling berkesinambungan, yaitu: (1) penguatan aspek legalitas kelembagaan, (2) penyusunan dan penerapan tata kelola organisasi yang baik, serta (3) peningkatan kapasitas pengelolaan dan pencatatan keuangan koperasi. Ketiga capaian ini menjadi fondasi penting dalam membangun koperasi yang profesional, transparan, dan berdaya saing sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat nelayan. Sosialisasi mengenai aspek legalitas koperasi yang disampaikan oleh Yokotani, S.H., M.H. berhasil meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota koperasi tentang urgensi legitimasi hukum dalam pengelolaan organisasi. Melalui kegiatan ini, masyarakat koperasi menyadari bahwa legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat utama untuk menjamin keberlanjutan lembaga, memperoleh kepercayaan publik, dan membuka akses terhadap berbagai peluang dukungan, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Pendampingan penyusunan dokumen legal seperti akta notaris, Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART) menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi hukum dan tata kelola kelembagaan koperasi.

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dan pelatihan tata kelola koperasi oleh Dr. Rulyanti Susi Wardhani, S.E., M.Si. menekankan penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Melalui penyusunan AD/ART yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta panduan tata kelola koperasi, pengurus dan anggota kini memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Kegiatan ini juga memfasilitasi terbentuknya struktur organisasi yang sistematis, mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, dan peningkatan partisipasi anggota dalam setiap kegiatan koperasi. Implikasi dari penerapan GCG ini terlihat pada munculnya budaya organisasi yang kolaboratif, di mana setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab dan peran aktif dalam mengembangkan koperasi. Pada aspek keuangan, pelatihan yang difasilitasi oleh Alfiany Alim Imro'ah, M.Sc. menghadirkan pendekatan praktis dan aplikatif untuk memperkuat kapasitas pengurus dalam mengelola sistem pencatatan keuangan. Melalui penyusunan Buku Panduan Pencatatan Keuangan Koperasi, kegiatan ini memberikan pedoman yang sistematis bagi pengurus untuk melakukan pencatatan transaksi harian, pengelolaan kas, dan penyusunan laporan keuangan periodik secara tertib dan transparan. Transformasi ini menandai pergeseran koperasi dari entitas ekonomi yang bersifat informal menuju lembaga yang kredibel, akuntabel, dan siap bersinergi dengan berbagai pihak dalam rantai ekonomi lokal. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa legalitas kelembagaan, tata kelola yang baik, dan manajemen keuangan yang akuntabel merupakan tiga pilar utama penguatan koperasi

masyarakat nelayan. Sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah desa membentuk model kolaboratif yang efektif dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Lebih dari sekadar peningkatan kapasitas teknis, program ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi pengembangan koperasi nelayan di wilayah pesisir Bangka Belitung dan daerah lainnya.

4.2 Limitasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai dasar pengembangan program di masa mendatang. Pertama, pendampingan yang dilakukan masih terbatas pada penguatan aspek legalitas, tata kelola, dan pencatatan keuangan koperasi, sehingga belum mencakup evaluasi jangka panjang terhadap kinerja kelembagaan dan dampak ekonomi bagi anggota. Keterbatasan waktu pelaksanaan membuat tim belum sepenuhnya dapat memantau efektivitas penerapan sistem pencatatan keuangan secara berkelanjutan maupun menilai perubahan perilaku organisasi setelah koperasi memperoleh legalitas. Kedua, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pengurus dan anggota koperasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan manajerial. Variasi tingkat pendidikan dan pengalaman anggota menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi terhadap sistem administrasi dan keuangan yang baru diperkenalkan.

4.3 Saran dan Studi Lanjutan

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, tim pengabdian merencanakan program lanjutan yang diarahkan pada penguatan identitas dan kapasitas kelembagaan koperasi. Kegiatan lanjutan meliputi pembuatan profil koperasi sebagai dokumen publik yang memuat visi, misi, struktur organisasi, bidang usaha, dan potensi ekonomi yang dimiliki Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri. Profil ini diharapkan menjadi media promosi dan sarana transparansi bagi masyarakat serta mitra potensial. Selain itu, tim juga akan membantu koperasi dalam membangun akun media sosial resmi (seperti Facebook dan Instagram) guna memperluas jangkauan informasi, memperkenalkan produk koperasi, serta membangun citra positif di ruang digital. Langkah ini menjadi penting agar koperasi dapat beradaptasi dengan perkembangan komunikasi dan pemasaran modern yang berbasis teknologi digital. Lebih lanjut, tim pengabdian juga merencanakan pendampingan penyusunan rencana bisnis koperasi yang komprehensif, mencakup analisis potensi usaha, proyeksi keuangan, strategi pemasaran, serta rencana pengembangan jangka menengah. Rencana bisnis ini akan menjadi panduan strategis bagi koperasi dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi anggota. Melalui kegiatan lanjutan tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya memiliki landasan kelembagaan yang kuat, tetapi juga mampu menampilkan diri sebagai entitas ekonomi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dimasa yang akan datang, keberhasilan program ini akan menjadi model replikasi bagi pengembangan koperasi nelayan lain di wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus memperkuat kontribusi koperasi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal berbasis sumber daya perikanan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas tahun 2025, Universitas Bangka Belitung menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas dukungan pendanaan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan program ini. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Universitas Tahun Anggaran 2025 Nomor: 1536/UN50/M/PM/2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Koperasi Produsen Serumpun Sejahtera Mandiri Desa Batu Rusa sebagai mitra utama dalam kegiatan ini atas kerja sama, partisipasi aktif, dan keterbukaan dalam proses pendampingan. Antusiasme dan komitmen pengurus serta anggota koperasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kegiatan sosialisasi, penyusunan dokumen legalitas, tata kelola, dan panduan pengelolaan keuangan koperasi. Selain itu, apresiasi yang tinggi diberikan kepada Pemerintah Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, yang telah memberikan dukungan administratif, fasilitas, serta suasana kolaboratif yang kondusif selama pelaksanaan kegiatan. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah

desa, dan masyarakat nelayan ini menjadi bentuk nyata penerapan prinsip triple helix dalam penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Tim pengabdian berharap kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat di masa mendatang, guna memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung.

Referensi

- Anggraeni, M., Rustiadi, E., & Yulianto, G. (2020). Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Natuna. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(1), 11-23. doi:<http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8155>
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan: perspektif modal kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118-132. doi:<https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Baranti, A., Anwar, S. M., & Qamaruddin, M. Y. (2024). Pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Boma Tirta Prima Makassar. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 5(2), 379-388. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v5i2.3390>
- Ciptagustia, A., Sari, M., & Gaffar, V. (2022). Peningkatan kualitas tata kelola lembaga keuangan berbasis komunitas dengan implementasi good corporate governance. *Journal of Community Service*, 4(1), 052-062. doi:<https://doi.org/10.56670/jcs.v4i1.79>
- Damayanti, N., Sitio, V. S. S., & Wicaksono, A. P. (2025). Model kepuasan kerja sebagai mediator produktivitas: studi pada karyawan di Bandara Halim. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 6(2), 565-578. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v6i2.4990>
- Daryono, A., Salim, S., & Nurisnani, P. S. (2021). Analisis pembinaan masyarakat pesisir berbasis budaya lokal oleh staf potensi Maritim Lanal Bangka Belitung dalam mendukung pertahanan negara. *UIR Law Review*, 5(2), 57-67. doi:[https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5\(2\).7120](https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5(2).7120)
- Dasuki, R. E. (2024). Pelatihan Pengelolaan keuangan bagi pengurus koperasi di Kabupaten Purwakarta. *E-Coops-Day*, 5(1), 103-114. doi:<https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v5i1.4195>
- Dewi, R. C. (2019). Pendampingan pembuatan AD/ART dalam rangka meningkatkan mekanisme kerja koperasi pada koperasi wanita swatika Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 3(1), 25-34. doi:<https://doi.org/10.26533/comvice.v3i1.262>
- Ernawati, F. Y., & Fauziyanti, W. (2022). Pentingnya legalitas hukum pendirian koperasi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota koperasi memayu jogo tonggo kopeng. *Journal of Social Work and Empowerment*, 1(2), 9-14. doi:<https://doi.org/10.58982/jswe.v1i2.136>
- Kurniawan, K., br Sebayang, M., & Utami, E. (2019). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan menggunakan metode surplus produksi diperairan Kabupaten Bangka Tengah (potential and level utilization of fish resources use the production surplus method in the waters of Center Bangka Regency). *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 15(2), 129-133. doi:<https://doi.org/10.14710/ijfst.15.2.129-133>
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Kinerja pembangunan perikanan tangkap di Indonesia. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5(2), 69-84. doi:<https://doi.org/10.15578/marina.v5i2.8053>
- Limbong, M. (2018). Kajian potensi sumberdaya perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari*, 3(2), 114-128. doi:<https://doi.org/10.53676/jism.v3i2.51>
- Lu'luatuwwafiroh, L. I., Utami, M., Jailani, J., & Ariyanto, B. (2025). Faktor-Faktor yang mempengaruhi turnover intention karyawan CV. Dua Putri Mojo. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 6(3), 591-603. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v6i3.4036>
- Mardiyani, Y., & Yulianti, A. (2020). Analisis pengaruh sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(2), 41-50. doi:<https://doi.org/10.33019/equity.v8i2.47>
- Mayu, D. H., Wijayanto, D., Mudzakir, A. K., & Kurniawan, K. (2021). Penentuan komoditas unggulan perikanan tangkap di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Marine Fisheries Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(1), 47-58. doi:<https://doi.org/10.29244/jmf.v12i1.33762>

- Mirza, Br, A. D., Putra, J., Desriani, N., & Rohman, F. (2024). Program pendampingan komprehensif untuk UMKM Kota Bandar Lampung: Legalitas usaha dan literasi keuangan syariah. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 3(2), 49-59. doi:<https://doi.org/10.35912/jpu.v3i2.3358>
- Muharram, A. I. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. *Jurnal Economina*, 2(12), 3787-3797. doi:<https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim, H. (2024). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 522–530. doi:<https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160>
- Nugraha, H., Hamid, R. S., & Qamaruddin, M. Y. (2024). Pengaruh keadilan kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 5(1), 105-114. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v5i1.3229>
- Nurphadilah, D., Jubaedah, I., Yulistianto, A. A., & Samsuri, E. (2022). Potensi perikanan di Wilayah Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 16(3), 267-278. doi:<https://doi.org/10.33378/jppik.v16i3.338>
- Pramithasari, C., & Wibowo, P. A. (2025). Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan melalui locus of control dan self-efficacy. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 6(1), 231-249. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v6i1.3788>
- Rahayu, S., Yudi, Y., Jumaili, S., Rahayu, R., & Ridwan, M. (2021). Optimalisasi pengelolaan keuangan koperasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 372-377. doi:<https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16222>
- Ridwan, M. Q., Yunita, A., & Harahap, F. R. (2024). Easy-Apply laporan keuangan berbasis android for free: UMKM melek digital. *Abdimas Universal*, 6(2), 394-399. doi:<https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v6i2.511>
- Ridwan, M. Q., & Zaky, A. (2015). Analisis Penghitungan harga pokok produksi (studi kasus pada umkm hunay Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2), 1-17.
- Saputra, R., & Firmansyah, A. (2024). The impact of ethic and competence on audit quality: accountability as moderating variable. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 5(2), 181-198. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v5i2.3335>
- Sugartiningih, S., Harjono, I., Erfiansyah, E., Sugihyanto, T., Kodariah, S., Nurhalimah, H., & Farhan, Y. M. (2025). Penguatan aspek legalitas dalam pembentukan koperasi syariah di Desa Rancatungku. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 591-604. doi:<https://doi.org/10.70609/icom.v5i1.6757>
- Tikara, Y. S., Taqwa, E., Sading, Y., Jaya, A. H., & Musdayati, M. (2026). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Empowering the Community of Kalukubula Village. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 6(4), 67-76. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v6i4.4671>
- Timang, C., Baktiar, B., & Yunus, M. H. (2026). The Effect of Cooperative Education and Entrepreneurship Training on Credit-Union Members' Welfare. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 6(4), 431-443. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v6i3.5738>
- Widiana, I. M. E., Surya, A., Desmon, D., Yudhinanto, Y., Hasbullah, H., & Meidasari, E. (2026). Pengaruh kompetensi, pengalaman, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai desa. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 6(3), 719-730. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v6i3.3574>
- Wiliastiti, I. A., Goca, I. G. P. A. W., & Putri, C. I. A. V. N. (2025). Determinan servant leadership terhadap employee loyalty melalui job satisfaction sebagai variabel intervening. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 6(3), 693-703. doi:<https://doi.org/10.35912/simo.v6i3.4894>
- Yuliani, Y. (2020). Potensi unggulan provinsi kepulauan bangka belitung perspektif perencanaan tahun 2021. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 47-55. doi:<https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.13>